

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

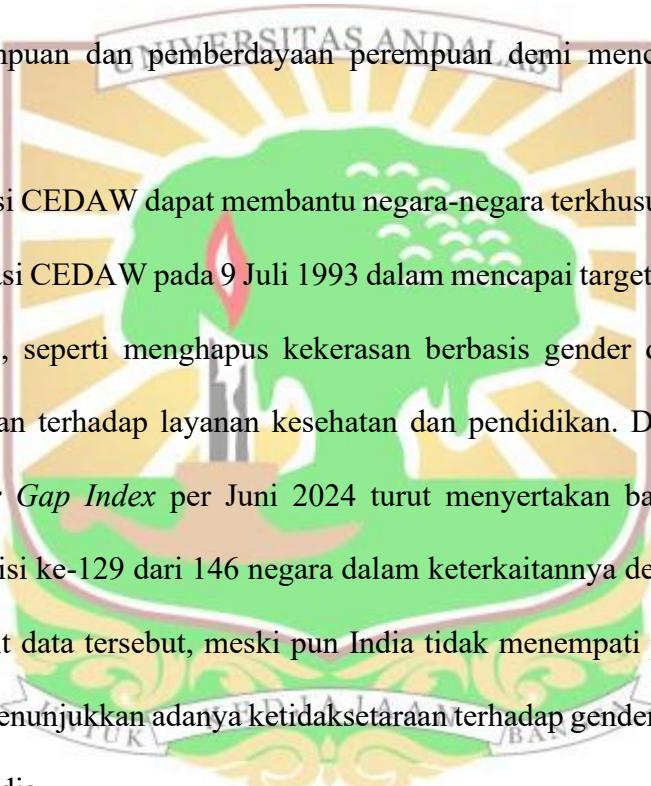
Data dari *World Health Organization* menyatakan bahwa perempuan seringkali menjadi pihak yang rentan dalam kehidupan bermasyarakat yang mana 30% perempuan di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun seksual per 25 Maret 2024.¹ Terbatasnya akses terhadap keadilan, minimnya perlindungan hukum yang responsif gender, serta budaya patriarki yang mengakar memperparah kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Adapun kekerasan yang dimaksud di sini ialah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang kemungkinan besar mampu mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk berbagai bentuk ancaman, pemaksaan, hingga perampasan kebebasan secara sewenang-wenang terhadap perempuan yang salah satunya disebabkan oleh norma patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.²

Upaya dalam mencapai kesetaraan gender tidak akan dapat dipisahkan dari penanggulangan berbagai permasalahan terkait kekerasan berbasis gender. Hal ini sesuai dengan isu krusial yang dibahas dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 5. Berdasarkan inti visi dari Agenda 2030, SDGs 5 menekankan bahwasanya penting untuk menghapus semua bentuk kekerasan

¹ World Health Organization. *Violence Against Women*. Maret 2024. (<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women> diakses online pada September 2024)

² UN Women. *The Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*. Desember 1979. (<https://wdc.unwomen.org/practice/resources/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women-cedaw> diakses online pada Oktober 2025)

terhadap perempuan dan anak perempuan, baik di ruang publik maupun privat, dan memastikan partisipasi penuh dan efektif dari perempuan sebagai langkah fundamental untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara.³ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) muncul sebagai konvensi internasional oleh PBB guna mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan demi mencapai kesetaraan gender.⁴



Implementasi CEDAW dapat membantu negara-negara terkhususnya India yang telah meratifikasi CEDAW pada 9 Juli 1993 dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs 5, seperti menghapus kekerasan berbasis gender dan memastikan akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Data terbaru oleh *Global Gender Gap Index* per Juni 2024 turut menyertakan bahwasanya India menempati posisi ke-129 dari 146 negara dalam keterkaitannya dengan kesetaraan gender.⁵ Terkait data tersebut, meski pun India tidak menempati posisi terbawah, hal ini masih menunjukkan adanya ketidaksetaraan terhadap gender yang signifikan dan serius di India.

Secara historis, masyarakat India kuno memiliki kepercayaan mengenai *Manusmṛti* Kode Manu atau *Code of Manu* dari kitab Hindu yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan di India baik secara fisik maupun emosional berada di bawah kedudukan laki-laki.⁶ Lebih lanjut, perempuan dianggap tidak akan

³ Policy Brief: The 2030 Agenda for Sustainable Development, the Security Sector and Gender Equality. 3-4.

⁴ Lisa Cahyanida Siswanto. "Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death". Journal of International Relations. Vol. 6. No. 4. 2020. 517-524.

⁵ World Economic Forum. *Global Gender Gap Insight Report*. Juni 2024. (https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf diakses online pada September 2024)

⁶ H. Patil dan Dr. Ramesh. "The Social Status of Indian Women of Different Periods in the Patriarchal Society." The Social Status of Indian Women of Different Periods in the Patriarchal Society Research Ambition: An International Multidisciplinary e-Journal. vol. 5. num. 4.

mampu melakukan apapun tanpa bantuan dari peran laki-laki yang pada akhirnya menyebabkan perempuan tidak akan bisa *independent* bahkan di rumahnya sendiri. Dalam aspek hukum, pemerintah India mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan pada tahun 2010 dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2013 yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, seksual, dan emosional, serta menciptakan mekanisme untuk memberikan bantuan kepada korban dengan turut menekankan pencegahan dan rehabilitasi.⁷



Guna menanggulangi berbagai permasalahan terkait KBG terhadap perempuan di India, CARE (*Cooperative for Assistance and Relief Everywhere*) International muncul sebagai salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang mendukung gerakan kesetaraan gender. Seiring berjalannya waktu, CARE Internasional secara penuh mulai mengadopsi fokusnya terhadap perempuan dan anak perempuan pada tahun 2006 yang kemudian menjadi alasan kuat CARE Internasional mulai memfokuskan bantuannya terkait KBG terhadap perempuan di India. Hal ini, salah satunya didasari oleh pandangan CARE Internasional terhadap kesetaraan gender yang dianggap sebagai kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, marjinalisasi, dan ketidakadilan sosial baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, sehingga perempuan dapat hidup dalam struktur sosial yang adil dan merata.⁸

2021. Welfare Universe. India.

(<https://www.redalyc.org/journal/7039/703973410005/703973410005.pdf> diakses online pada September 2024)

⁷ Governance in India: Women's Rights (<https://www.cfr.org/backgrounder/governance-india-womens-rights> diakses online pada September 2024)

⁸ CARE International in India

(<https://web.archive.org/web/20150219234226/http://www.careindia.org/vision-mission> diakses pada Agustus 2024)

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah membawa dampak yang luas dan mendalam, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. Di India, pandemi menyebabkan gelombang pemutusan kerja dan penurunan pendapatan, terutama di sektor informal di mana banyak perempuan bekerja. Hal ini kemudian menyebabkan ketergantungan ekonomi pada pelaku kekerasan meningkat dan membuat perempuan sulit keluar dari situasi berbahaya. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seringkali terisolasi dari jaringan sosial pendukungnya, seperti keluarga, teman, bahkan layanan sosial yang kemudian turut meningkatkan resiko kekerasan terlebih pemberlakuan *lockdown* memaksa perempuan untuk tinggal bersama pelaku tanpa akses ke bantuan eksternal.⁹ Situasi ini semakin memperburuk masalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan adanya laporan dari Komisi Nasional Perempuan India di mana terdapat 2,5 kali lipat peningkatan aduan kasus kekerasan domestik setelah kebijakan *lockdown* diterapkan pada Maret 2020 lalu.¹⁰

CARE Internasional kemudian mulai bekerja sama dengan mitra nasional dan pemerintah India dengan mengukuhkan pendirian dari CARE India *Solutions for Sustainable Development* atau CISSD pada tahun 2008.¹¹ Hal ini bertujuan agar CARE Internasional mampu melaksanakan tugasnya di India dengan lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Sejak pengukuhan tersebut, CARE Internasional, CARE

⁹ UN Sustainable Development Group. *Shadow Pandemic: UN India responds to uptick in violence against women and girls during COVID-19.* 09 December 2020. (<https://unsdg.un.org/latest/stories/shadow-pandemic-un-india-responds-uptick-violence-against-women-and-girls-during> diakses online pada Oktober 2025).

¹⁰ UN Women. “*Perempuan dan COVID-19 di India.*” 27 Juli 2021. (<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/7/faq-women-and-covid-19-in-india> diakses pada Desember 2024)

¹¹ CARE International in India (<https://web.archive.org/web/20150219234226/http://www.careindia.org/vision-mission> diakses pada Agustus 2024)

India beserta pemerintah India mulai dengan gencar menyediakan berbagai layanan maupun agenda, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi perempuan, gender dan diskriminasi, serta advokasi guna membantu para perempuan dan anak perempuan di India, seperti adanya upaya untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dengan berfokus pada implementasi hukum yang lebih baik. Sehingga kemudian, hal ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat India menjadi lebih peka terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan KBG terhadap perempuan.¹²

Penelitian ini mulai dilakukan pasca COVID-19 pada tahun 2021 hingga tahun 2023 yang mana selama periode *lockdown*, banyak perempuan mengalami peningkatan beban kerja domestik dan kekerasan, yang membuat situasi mereka semakin rentan. Penelitian ini diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari pandemi terhadap perempuan dan penting untuk mendeskripsikan program-program yang telah dilaksanakan oleh CARE Internasional dan aktor lainnya dalam menangani KBG terhadap perempuan di India pasca COVID-19 pada tahun 2021-2023. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang peranan CARE Internasional sebagai suatu INGO dengan turut memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

India memiliki latar belakang budaya yang kompleks yang seringkali melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Namun, terlepas dari

¹² CARE India. “*National Strategy on Gender in Emergencies.*” (https://web.archive.org/web/20150218140617/http://www.careindia.org/sites/default/files/pdf_file/Gender%20Strategy_Booklet_04-10-12_0.pdf diakses pada September 2024)

faktor apa saja yang melatarbelakangi tingginya kasus KBG terhadap perempuan di India, penerapan *lockdown* semakin memperburuk masalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan adanya laporan peningkatan kasus kekerasan domestik. CARE Internasional kemudian muncul sebagai salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang turut andil dalam mengupayakan penanggulangan terhadap berbagai permasalahan KBG terhadap perempuan di India.¹³ CARE Internasional kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak berwenang di India guna meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dengan mengadopsi berbagai program dan strategi untuk menangani KBG terhadap perempuan dalam berbagai aspek.¹⁴ Dengan demikian, penting untuk mendeskripsikan peran CARE Internasional dalam menanggulangi KBG terhadap perempuan di India.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah yang dihadirkan, penelitian ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan: “Bagaimana peran CARE Internasional dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India pasca COVID-19 pada tahun 2021-2023?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran dari CARE Internasional dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India pasca COVID-19 pada tahun 2021-2023.

¹³ CARE International in India.

¹⁴ CARE International. “*CARE and the SDGS: Impact and Learning Analysis*”. 2021.

1. 5 Manfaat Penelitian

a. Akademik

Penelitian ini memberikan manfaat akademis yang signifikan, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teori dalam ilmu hubungan internasional karena turut membahas mengenai peranan aktor non-negara dalam menganggulangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, terkhususnya di India yang memiliki karakteristik sebagai negara berkembang dengan adanya sistem budaya dan sosial yang kompleks yang masih mempengaruhi interaksi sosial masyarakat India hingga saat ini. Dengan mendeskripsikan berbagai upaya yang diterapkan oleh CARE Internasional dan aktor lainnya dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional non-pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut, penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang ada dalam studi gender. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademis dan pengembangan teori dalam studi gender.

b. Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa wawasan yang berharga terkhususnya bagi peneliti, kemudian bagi lembaga pendidikan terkhususnya Universitas Andalas, pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah, para aktivis terkhususnya yang menyuarakan hak-hak perempuan, serta lembaga bantuan lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan program penanggulangan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi diharapkan juga

berkontribusi pada upaya nyata dalam menanggulangi KBG terhadap perempuan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

1.6 Kajian Pustaka

Terdapat lima studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini yang kemudian bisa digunakan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, yaitu: pertama, artikel jurnal oleh Yoana Septiani Setiya Ferisca, Ningsih Susilawati, Ida Bagus Putu Aditya, dan Indra Krishnamurti pada tahun 2023 dengan judul *India Government Policies in Handling Gender-Based Violence against Women during the COVID-19 Pandemic: A Feminist Perspective*.¹⁵ Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam memahami faktor-faktor ketidaksetaraan gender dan KBG terhadap perempuan di India serta kebijakan pemerintah India dalam menangani KBG selama pandemi COVID-19 dengan adanya bantuan dari pemerintah negara bagian dan NGO. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah feminism.

Isi atau pembahasan dalam artikel jurnal ini menjelaskan definisi serta konsep gender dan bagaimana bias gender berkontribusi pada ketidaksetaraan yang kemudian mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan, termasuk kekerasan domestik dan diskriminasi sosial. Artikel jurnal ini juga mengkaji kebijakan yang ada, seperti Nirbhaya Fund, serta tantangan dalam implementasi dan dampak pandemi COVID-19 terhadap kekerasan terhadap perempuan, serta menyoroti kontribusi organisasi non-pemerintah dan masyarakat dalam mendukung korban dan advokasi untuk perubahan kebijakan.¹⁶ Artikel jurnal

¹⁵ Yoana Septiani Setiya Ferisca dkk. “*Government Policies in Handling Gender-Based Violence against Women during the COVID-19 Pandemic: A Feminist Perspective.*” Liaison Journal of Best. Vol. 2. No. 1. Januari 2023.

¹⁶ Yoana Septiani Setiya Ferisca dkk. “*Government Policies in Handling Gender-Based Violence against Women during the COVID-19 Pandemic: A Feminist Perspective.*” Hal. 14-23.

ini membantu peneliti dalam melihat bagaimana upaya pemerintah India dalam menanggulangi KBG terhadap perempuan di India terkhususnya pada pandemi COVID-19.

Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian peneliti terdapat pada waktu dan aktor yang dikaji. Artikel jurnal ini mengkaji upaya pemerintah India sebagai aktor yang berperan dalam upaya penganggulangan KBG terhadap perempuan di India pada pandemi COVID-19 sedangkan peneliti mengkaji CARE Internasional sebagai aktor utama yang mengupayakan berbagai permasalahan terkait KBG terhadap perempuan di India pada rentang tahun 2021-2023.

Artikel jurnal kedua adalah *Implementasi Program Anti-dowry UN Women dalam Upayanya Mengatasi Permasalahan Dowry Death, India (2016-2021)* oleh Syva Octaviani dan Nur Azizah pada tahun 2023.¹⁷ Secara keseluruhan, artikel jurnal membahas mengenai KBG dengan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik dan seksual yang mana dalam penelitian ini ialah praktik *Dowry* dengan turut menggambarkan dampak negatif dari praktik *Dowry*, termasuk kematian dan gangguan mental pada perempuan. Penelitian ini kemudian membahas implementasi program *Anti-Dowry* dengan menganalisis upaya UN Women dalam mengatasi masalah *dowry death* melalui program-program advokasi dan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan aktor-aktor, seperti UN Women sebagai entitas PBB yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kemudian CARE Internasional sebagai

¹⁷ Syva Octaviani dan Nur Azizah. “*Implementasi Program Anti-dowry UN Women dalam Upayanya Mengatasi Permasalahan Dowry Death, India (2016-2021)*”. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 6. No. 2. November 2023. (<https://pdfs.semanticscholar.org/9bc1/e8bb648b418af56761057dc1cc6fd7b848bb.pdf> diakses online pada Oktober 2024)

lembaga organisasi non-pemerintah yang berkolaborasi dalam program *Anti-Dowry*, dan pemerintah India yang berperan dalam merancang dan menerapkan kebijakan untuk mengatasi praktik *Dowry* dan mendukung program-program advokasi.¹⁸

Menggunakan kerangka konsep yang mencakup teori feminism yang memfokuskan pada hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, konsep hak asasi manusia (HAM) yang menekankan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dan organisasi internasional. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis upaya dunia internasional, khususnya UN Women, dalam menangani ketidaksetaraan gender dan praktik *Dowry* di India. Selanjutnya, upaya dan kolaborasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memberikan dampak berkelanjutan pada praktik mahar di India dalam mengurangi diskriminasi gender dan kematian terkait mahar, mempromosikan kesetaraan gender melalui advokasi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Adapun perbandingan penelitian dari artikel jurnal ini dengan penelitian oleh peneliti terletak pada unit analisis dan batas waktu penelitian. Di mana penelitian peneliti berfokus pada upaya CARE Internasional sebagai unit analisis pada 2021-2023 sedangkan artikel jurnal ini berfokus pada upaya UN Women pada konteks yang sama di India pada tahun 2016-2021. Meski demikian, penelitian ini berguna bagi peneliti karena meliputi pemahaman mendalam tentang peran organisasi internasional pemerintah dan/atau non-pemerintah dalam hubungan internasional dan dampaknya terhadap isu gender.

¹⁸ Syva Octaviani dan Nur Azizah. “*Implementasi Program Anti-dowry UN Women dalam Upayanya Mengatasi Permasalahan Dowry Death, India (2016-2021)*”. Hal. 906-917.

Artikel jurnal ketiga berjudul *Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry* oleh Wiwik Sukarni Pertiwi, Alfian Hidayat, Khairur Rizki pada tahun 2021.¹⁹ Artikel jurnal ini menganalisis penerapan CEDAW dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan akibat praktik mahar di India. Penelitian ini menggunakan teori feminis, tata kelola pemerintahan yang baik, dan konsep organisasi internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terkait mahar merupakan bentuk kekerasan budaya yang berakar pada tradisi Hindu. Meskipun ada berbagai upaya, kematian akibat mahar dan diskriminasi gender tetap menjadi masalah yang umum di India.

Artikel jurnal ini juga bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah India yang didukung oleh organisasi, seperti UN Women dan CARE Internasional yang turut mengimplementasikan CEDAW, terkhususnya sebagai salah satu upaya terhadap praktik *Dowry*. Lebih lanjut, penelitian ini juga ingin menjelaskan konteks multidimensi ketidaksetaraan gender yang ada di India. Selain itu, artikel jurnal ini berupaya memberikan strategi dan implikasi kebijakan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan posisi bermartabat bagi perempuan India.²⁰ Adapun penelitian ini menjadikan pemerintah India sebagai unit analisis yang diteliti sedangkan penelitian peneliti menjadikan CARE Internasional sebagai unit analisis.

¹⁹ Wiwik Sukarni Pertiwi, Alfian Hidayat, Khairur Rizki. “*Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry*”. IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 3 Ed.1. Pages 55 -80. January-June 2021.

²⁰ Wiwik Sukarni Pertiwi, Alfian Hidayat, Khairur Rizki. “*Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry*”. Hal. 58-75.

Artikel jurnal selanjutnya berjudul *Peran UN Women terhadap Gender-Based Violence di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018* oleh Pipin Indra Rohmawati, Satria Rizaldi Alchatib, dan Setyashih Harini pada tahun 2023.²¹ Artikel jurnal ini membahas mengenai dampak global dari KBG terhadap perempuan dan anak perempuan yang disertai dengan statistik yang menunjukkan relevansinya.

Artikel jurnal ini turut membahas berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan dari kasta dalit, termasuk kekerasan seksual dan penolakan akses keadilan. Artikel jurnal ini menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti kelas, ras, dan agama yang berkontribusi pada pengalaman kekerasan yang kompleks bagi perempuan.²² UN Women dan pemerintah India hadir dan terlibat dalam artikel jurnal ini yang mana kedua aktor ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, penanganan KBG bagi perempuan dalit di India, dan pihak berwenang dalam penegakan hukum dan kebijakan terkait gender dan kekerasan.

Feminisme interseksional dan organisasi internasional digunakan sebagai konsep dalam penelitian ini karena peneliti menganggap bahwa konsep ini relevan dengan perbedaan situasi yang dihadapi oleh perempuan sebagai kelompok marginal, serta bagaimana faktor-faktor seperti ras, kelas, dan gender saling berinteraksi.²³ Kemudian, penelitian ini ditujukan guna menganalisis kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan dari kasta dalit di India dengan menyoroti kontribusi UN Women dalam memberdayakan perempuan dan

²¹ Pipin Indra Rohmawati, Satria Rizaldi Alchatib, dan Setyashih Harini. “*Peran UN Women terhadap Gender-Based Violence di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018*.” Jurnal Alternatif Vol. 14 No.2. Tahun 2023.

²² Pipin Indra Rohmawati, Satria Rizaldi Alchatib, dan Setyashih Harini. “*Peran UN Women terhadap Gender-Based Violence di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018*.” Hal 3-11.

²³ Pipin Indra Rohmawati, Satria Rizaldi Alchatib, dan Setyashih Harini. “*Peran UN Women terhadap Gender-Based Violence di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018*.” Hal. 5-6.

mengatasi ketidaksetaraan gender serta meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalit dan pentingnya intervensi strategis dalam kebijakan. Penelitian ini memberikan manfaat kepada peneliti untuk menyediakan data dan analisis mendalam tentang kekerasan berbasis gender, khususnya yang dialami oleh perempuan dalit yang kemudian dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut.

Adapun perbandingan artikel jurnal ini dengan penelitian peneliti ialah terdapat pada unit analisis yang dikaji. Penelitian ini menyoroti UN Women sebagai unit analisis dengan memfokuskan upayanya terhadap perempuan dalit di India sedangkan penelitian peneliti menyoroti CARE Internasional sebagai unit analisis dan aktor utama dengan memfokuskan upaya-upayanya dalam menanggulangi KBG terhadap perempuan India secara keseluruhan.

Artikel jurnal terakhir berjudul *Pandemi COVID-19 dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender di India* oleh Dheannaz Tirtoputri pada tahun 2022.²⁴ Artikel ini mengungkapkan bahwa selama periode *lockdown* yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan domestik terhadap perempuan. Poin utama yang dibahas di dalam artikel jurnal ini adalah adanya keterkaitan antara pandemi COVID-19 dengan tingginya peningkatan kekerasan berbasis gender di mana laporan menunjukkan bahwa selama periode pembatasan sosial, banyak perempuan mengalami peningkatan risiko kekerasan domestik, dengan data dari Komisi Nasional Perempuan India

²⁴ Dheannaz Tirtoputri. “*Pandemi COVID-19 dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender di India.*” Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 6 Nomor 1. 2022.

mencatat kenaikan 100% aduan kasus kekerasan domestik sejak penerapan *lockdown* pada 24 Maret 2020.²⁵

Artikel jurnal ini menyoroti bahwa norma-norma patriarki yang mendalam dalam masyarakat India berkontribusi pada legitimasi kekerasan terhadap perempuan. Minimnya partisipasi ekonomi perempuan, yang disebabkan oleh norma dan keyakinan struktural, memperburuk situasi dengan melanggengkan kekerasan. Dengan penerapan kebijakan *work from home* (WFH), tanggung jawab mengurus rumah tangga semakin banyak dibebankan kepada perempuan. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap pekerjaan dan berkurangnya kemandirian finansial, yang pada akhirnya memperparah posisi mereka dalam struktur rumah tangga.²⁶

Dalam analisisnya, Tirtoputri menggunakan perspektif *Care Focused Feminism* untuk menjelaskan bagaimana struktur sosial yang ada membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Konsep ketidaksetaraan gender juga menjadi kerangka untuk memahami dinamika ini. Artikel jurnal tersebut kemudian membahas peranan pemerintah India sebagai aktor penting dalam menanggulangi permasalahan kekerasan gender. Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor pemicu kekerasan, melakukan mitigasi, dan merumuskan kebijakan yang mengubah perilaku serta persepsi masyarakat terhadap kekerasan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan turut menganalisis berbagai referensi dari WHO, UN Women, UNICEF, dan UNHCR.²⁷

²⁵ Dheannaz Tirtoputri. “*Pandemi COVID-19 dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender di India.*” Hal. 1847.

²⁶ Dheannaz Tirtoputri. “*Pandemi COVID-19 dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender di India.*” Hal. 1847-1849.

²⁷ Dheannaz Tirtoputri. “*Pandemi COVID-19 dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender di India.*” Hal. 1847-1851.

Adapun perbedaan artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada unit analisis dan batasan penelitian yang dikaji. Artikel jurnal tersebut menjadikan pemerintah India sebagai unit analisis dengan turut menekankan pada peranan pemerintah India dan upayanya terhadap peningkatakan kasus kekerasan berbasis gender di India pada masa COVID-19. Penelitian ini menjadikan CARE Internasional sebagai unit analisis dalam menjalakan perannya dalam menanggulangi KBG terhadap perempuan pasca COVID-19 pada tahun 2021 hingga 2023.

1.7 Kerangka Konseptual

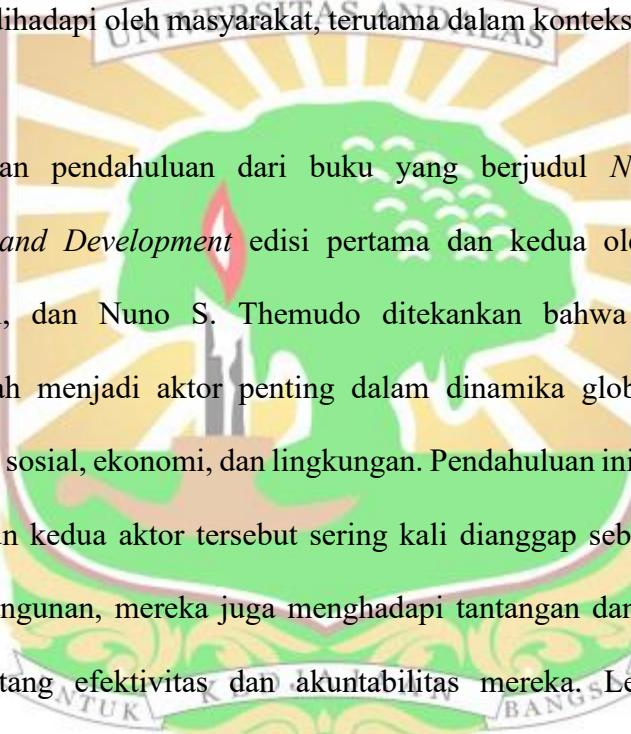
Kerangka konseptual dibutuhkan dalam menyusun sebuah penelitian atau penulisan karya ilmiah. Biasanya, kerangka konseptual didefinisikan sebagai sebuah struktur yang memberikan panduan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena atau isu tertentu dengan membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, mengidentifikasi variabel, dan menetapkan hubungan antara variabel-variabel yang terdapat di dalam sebuah pembahasan penelitian tersebut. Ini juga berfungsi sebagai panduan untuk pengumpulan dan analisis data.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep Peran *Non-Governmental Organization (NGO)* oleh David Lewis, Nazneen Kanji, dan Nuno S. Themudo.

1.7.1 Peran *Non-Governmental Organization (NGO)*

Dalam konteks tata kelola global, pertumbuhan aktor-aktor internasional selain negara, seperti *International Non-Governmental Organization* atau INGO, *Non-Governmental Organization* atau NGO, *Multinational Corporations* atau MNC,

²⁸ Uwe Flick. “*An Introduction to Qualitative Research.*” SAGE, 4th Edition. London. 2009.

dan lain sebagainya meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, INGO dan NGO meningkat lebih cepat terkhususnya setelah perang dunia kedua berakhir. Keberadaan aktor-aktor internasional selain negara tersebut dijelaskan sebagai bagian dari evolusi masyarakat sipil yang berupaya memenuhi kebutuhan sosial dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Bahkan sejak awal abad ke-20, INGO dan NGO mulai muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam konteks perang dan krisis kemanusiaan.²⁹

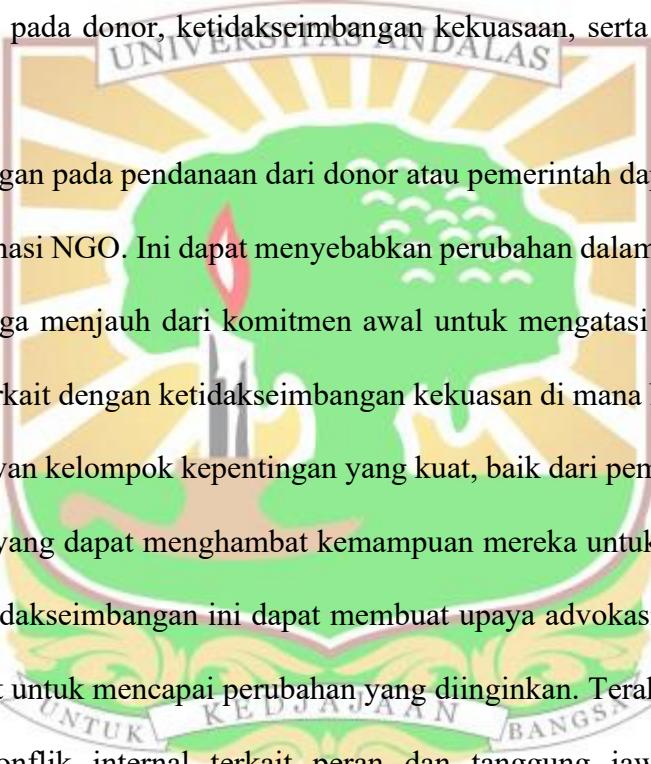


Dalam bagian pendahuluan dari buku yang berjudul *Non-Governmental Organizations and Development* edisi pertama dan kedua oleh David Lewis, Nazneen Kanji, dan Nuno S. Themudo ditekankan bahwa organisasi non-pemerintah telah menjadi aktor penting dalam dinamika global, berkontribusi terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendahuluan ini juga menyatakan bahwa meskipun kedua aktor tersebut sering kali dianggap sebagai solusi untuk masalah pembangunan, mereka juga menghadapi tantangan dan kritik, termasuk pertanyaan tentang efektivitas dan akuntabilitas mereka. Lewis, Kanji, dan Themudo kemudian menggarisbawahi pentingnya memahami konteks bagaimana sebuah organisasi non-pemerintah beroperasi, termasuk hubungan mereka dengan pemerintah, donor, dan masyarakat sipil.³⁰ Mereka juga menekankan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan membangun kemitraan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan.

²⁹ David Lewis, Nazneen Kanji, dan Nuno S. Themudo. *Non-Governmental Organizations and Development*. Second Edition. Routledge. London. 2021. 1-7.

³⁰ David Lewis, Nazneen Kanji, dan Nuno S. Themudo. *Non-Governmental Organizations and Development*. Hal. 1-4.

Pada bagian yang sama, Lewis dan Kanji menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator yang dikategorikan sebagai tantangan dan kritik terhadap NGO dalam menjalankan perannya. Hal ini kemudian mampu mempengaruhi reputasi NGO sehingga menimbulkan pertanyaan terkait akuntabilitas, efektivitas, dan legitimasi dari NGO, terkhususnya bagi masyarakat atau komunitas yang suara mereka diwakili oleh NGO. Adapun tantangan dan kritik terhadap peran NGO, yakni ketergantungan pada donor, ketidakseimbangan kekuasaan, serta konflik internal dan eksternal.³¹



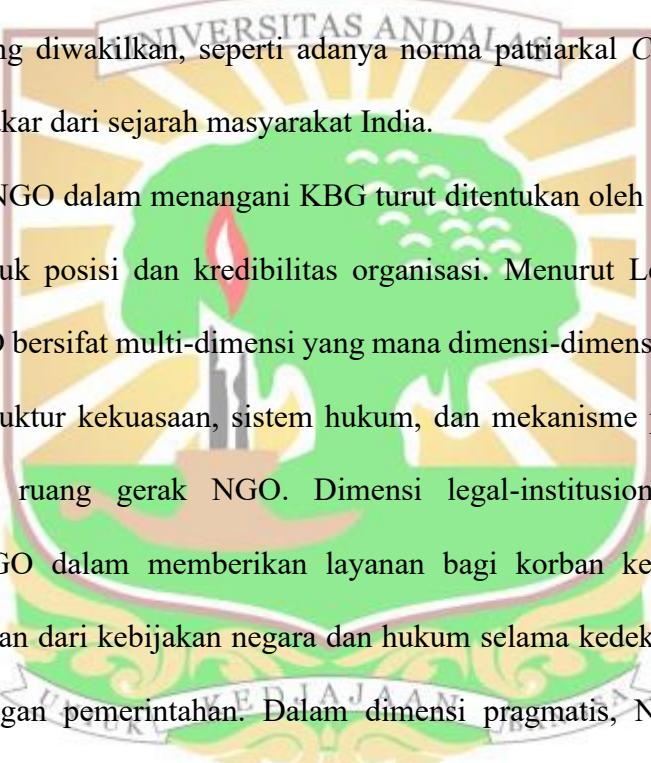
Ketergantungan pada pendanaan dari donor atau pemerintah dapat melemahkan akar dan legitimasi NGO. Ini dapat menyebabkan perubahan dalam misi dan tujuan mereka, sehingga menjauh dari komitmen awal untuk mengatasi isu-isu tertentu. Selanjutnya, terkait dengan ketidakseimbangan kekuasaan di mana NGO sering kali berjuang melawan kelompok kepentingan yang kuat, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan. Ketidakseimbangan ini dapat membuat upaya advokasi mereka kurang efektif dan sulit untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Terakhir, NGO dapat menghadapi konflik internal terkait peran dan tanggung jawab yang harus dijalani, serta konflik eksternal dengan para pemangku kepentingan yang kemudian mampu menghambat kolaborasi dan mengurangi efektivitas dalam mengatasi suatu isu.³²

Lebih lanjut, dalam konteks KBG, perlu untuk turut membahas mengenai pertimbangan dari faktor budaya dan struktural terhadap legitimasi dari NGO

³¹ David Lewis dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. First Edition. Routledge. London. 2009. 17-20.

³² David Lewis dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. 17-20.

mengingat legitimasi NGO turut membahas mengenai hasil interaksi antara nilai-nilai moral atau identitas organisasi serta hubungan dengan masyarakat lokal.³³ NGO yang dilihat sebagai bagian dari komunitas lokal cenderung mendapat legitimasi sosial lebih kuat. Jika eksistensi NGO bertabrakan tajam dengan norma lokal tanpa pendekatan sensitif, legitimasi mereka bisa runtuh atau memicu *backlash*, sehingga penting bagi NGO untuk memiliki keterikatan budaya dengan masyarakat yang diwakilkan, seperti adanya norma patriarkal *Code of Manu* di India yang berakar dari sejarah masyarakat India.



Legitimasi NGO dalam menangani KBG turut ditentukan oleh faktor struktural yang membentuk posisi dan kredibilitas organisasi. Menurut Lewis dan Kanji, legitimasi NGO bersifat multi-dimensi yang mana dimensi-dimensi ini berinteraksi erat dengan struktur kekuasaan, sistem hukum, dan mekanisme pendanaan yang mempengaruhi ruang gerak NGO. Dimensi legal-institusional memperkuat kredibilitas NGO dalam memberikan layanan bagi korban kekerasan dengan adanya dukungan dari kebijakan negara dan hukum selama kedekatan NGO tidak berlebihan dengan pemerintahan. Dalam dimensi pragmatis, NGO diharuskan untuk memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabilitas yang kuat terhadap penerima manfaat. Terakhir, dimensi normatif di mana NGO diharuskan untuk memiliki kesesuaian dengan nilai dan aspirasi masyarakat. NGO yang berhasil menjaga keseimbangan terhadap negara, donor, dan masyarakat akan lebih mampu untuk mempertahankan legitimasinya dalam jangka panjang.³⁴

³³ David Lewis, Nazneen Kanji, dan Nuno S. Themudo. *Non-Governmental Organizations and Development*. Second Edition. Routledge. London. 2021. 15-18.

³⁴ David Lewis, Nazneen Kanji, dan Nuno S. Themudo. *Non-Governmental Organizations and Development*. 18-23.

Berdasarkan konsep yang diusung oleh Lewis, Kanji, dan Themudo, terdapat tiga peran NGO yang saling terkait: sebagai pelaksana (*implementer*), katalisator (*catalyst*), dan mitra (*partner*) yang kemudian digunakan sebagai kerangka konseptual di dalam penelitian ini karena adanya persamaan dalam konsep peran NGO oleh Lewis, Kanji, dan Themudo dengan peran CARE Internasional dalam mengupayakan penanggulangan KBG terhadap perempuan di India. Konsep peran NGO yang diusung oleh Lewis, Kanji, dan Themudo masih relevan untuk menganalisis peran CARE Internasional sebagai sebuah INGO karena terdapat beberapa kesamaan terhadap kedua aktor ini dalam menjalankan perannya. Prinsip dasar seperti pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan koalisi sosial tetap sama.³⁵ Misalnya, NGO lokal bisa mengadvokasi hak-hak warga dalam satu negara; INGO juga mengadvokasi isu HAM secara lintas-negara, seperti Amnesty International atau Oxfam yang melakukan advokasi dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam konteks pembangunan dengan berkolaborasi bersama pemerintah serta organisasi lain.³⁶ Selanjutnya, penggunaan konsep tersebut ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam menjawab dan mendeskripsikan pertanyaan penelitian.

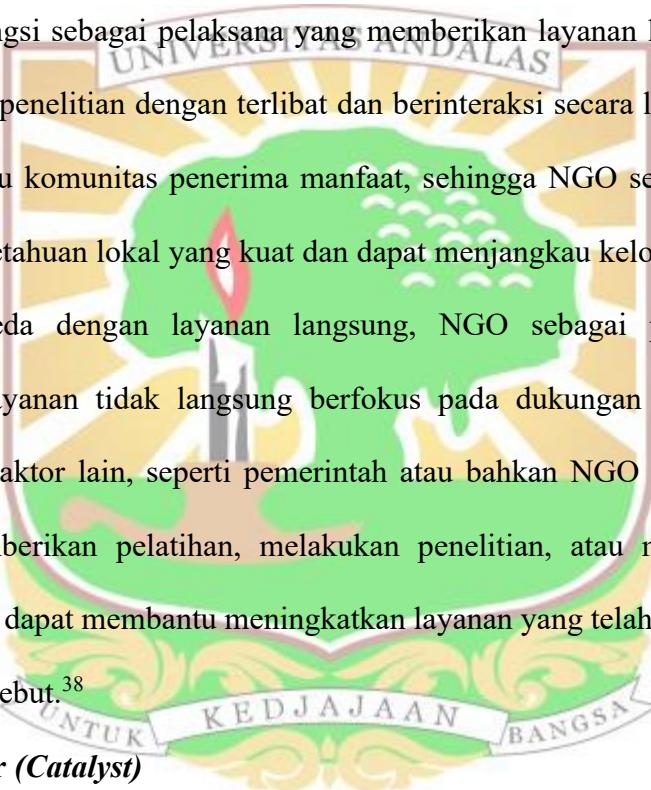
1. Pelaksana (*Implementer*)

Peran pelaksana merujuk pada fungsi utama NGO dalam memberikan layanan karena banyaknya orang di negara berkembang menghadapi situasi-situasi sulit, akan tetapi layanan dasar yang bersifat penting tidak tersedia atau layanan dasar

³⁵ Oliver Edward Walton, Thomas Davies, Erla Thrandardottir, dan Vincent Charles Keating. "Understanding Contemporary Challenges to INGO Legitimacy: Integrating Top-Down and Bottom-Up Perspectives." *Voluntas* (2016) 27:2764–2786. 2771.

³⁶ Oliver Edward Walton, Thomas Davies, Erla Thrandardottir, dan Vincent Charles Keating. "Understanding Contemporary Challenges to INGO Legitimacy: Integrating Top-Down and Bottom-Up Perspectives." 2768.

tersebut memiliki kualitas yang buruk. Peran NGO sebagai pelaksana ini turut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atau komunitas yang membutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih lanjut, terdapat dua upaya yang dilakukan oleh NGO dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana dalam pemberian layanan, yakni: layanan langsung dan layanan tidak langsung.³⁷



NGO berfungsi sebagai pelaksana yang memberikan layanan langsung berupa pelatihan serta penelitian dengan terlibat dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat atau komunitas penerima manfaat, sehingga NGO sering kali dinilai memiliki pengetahuan lokal yang kuat dan dapat menjangkau kelompok yang sulit diakses. Berbeda dengan layanan langsung, NGO sebagai pelaksana yang memberikan layanan tidak langsung berfokus pada dukungan atau penguatan kapasitas bagi aktor lain, seperti pemerintah atau bahkan NGO lain. Contohnya termasuk memberikan pelatihan, melakukan penelitian, atau mengembangkan kebijakan yang dapat membantu meningkatkan layanan yang telah disediakan oleh aktor-aktor tersebut.³⁸

2. Katalisator (*Catalyst*)

Katalisator adalah peran kedua NGO yang merujuk sebagai pemicu dalam mempercepat perubahan. Peran NGO sebagai katalisator dalam pembangunan mencakup dua aspek utama: advokasi kebijakan untuk perubahan serta inovasi dan solusi.³⁹

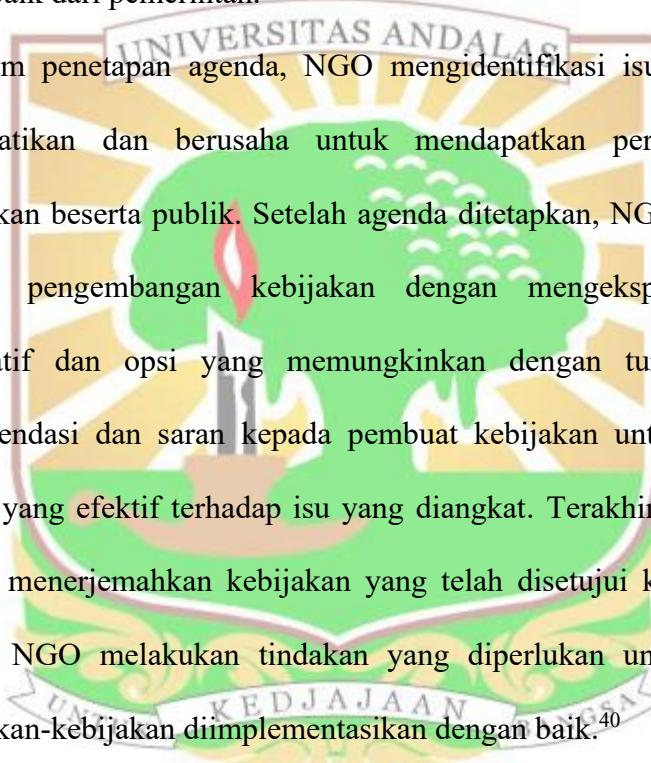
2.1. Advokasi Kebijakan

³⁷ David Lewis dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. 92-97.

³⁸ David Lewis dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. 93-97.

³⁹ David Lewis dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. 97.

Dilakukan oleh NGO dengan cara mempengaruhi kebijakan melalui tiga tahapan: penetapan agenda, pengembangan kebijakan, dan implementasi. Dalam advokasi ini, NGO berperan sebagai ‘pengusaha kebijakan’ yang memperjuangkan kepentingan kolektif dan menyuarakan perubahan untuk mengatasi akar penyebab masalah pembangunan. Selain itu, advokasi juga mencakup upaya untuk dapat mendorong masyarakat menuntut layanan lebih baik dari pemerintah.



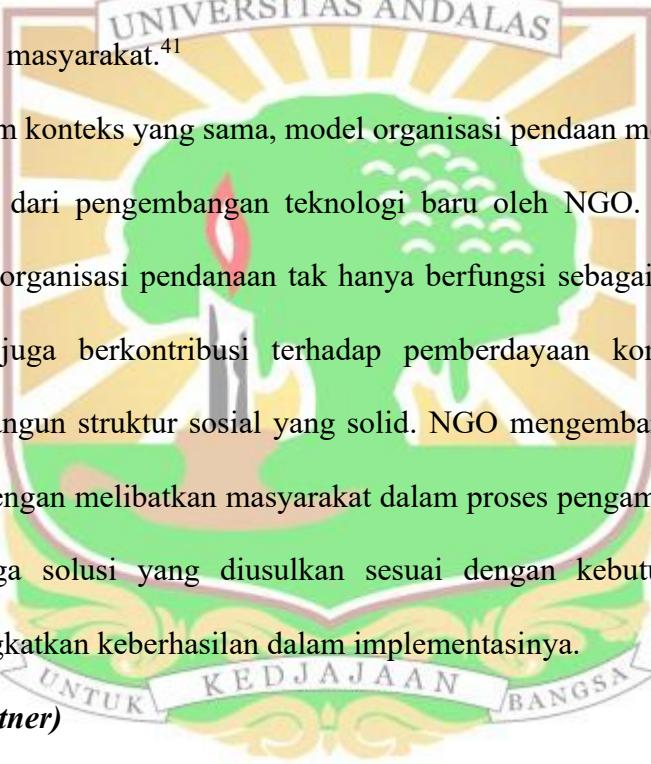
Dalam penetapan agenda, NGO mengidentifikasi isu-isu yang perlu diperhatikan dan berusaha untuk mendapatkan perhatian pembuat kebijakan beserta publik. Setelah agenda ditetapkan, NGO terlibat dalam proses pengembangan kebijakan dengan mengeksplorasi berbagai alternatif dan opsi yang memungkinkan dengan turut memberikan rekomendasi dan saran kepada pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi yang efektif terhadap isu yang diangkat. Terakhir, NGO berperan dalam menerjemahkan kebijakan yang telah disetujui ke dalam praktik nyata. NGO melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan diimplementasikan dengan baik.⁴⁰

Dalam konteks mempengaruhi kebijakan, NGO juga terlibat dalam dialog dengan pembuat kebijakan melalui diskusi informal dan temuan resmi untuk mempengaruhi kebijakan. Selain itu, mereka menggunakan strategi komunikasi yang efektif untuk bisa menyampaikan pesan dan membangun legitimasi di masyarakat lokal.

2.2. Inovasi dan Solusi

⁴⁰ David Lewis dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. 97-107.

Inovasi berperan dalam mempercepat perubahan melalui pengembangan dan penerapan solusi baru untuk masalah pembangunan. Dalam hal ini, NGO mencoba pendekatan inovatif yang mungkin tidak diadopsi oleh lembaga pemerintah atau organisasi besar lainnya, seperti dalam pengembangan teknologi baru sebagai salah satu upaya atau solusi untuk masalah pembangunan di mana NGO melakukan penelitian dan pengujian untuk memastikan efektivitas teknologi sebelum memperkenalkannya kepada masyarakat.⁴¹



Dalam konteks yang sama, model organisasi pendaan menjadi salah satu contoh dari pengembangan teknologi baru oleh NGO. Terkait hal ini, model organisasi pendanaan tak hanya berfungsi sebagai solusi finansial tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan komunitas dengan membangun struktur sosial yang solid. NGO mengembangkan teknologi baru dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan keberhasilan dalam implementasinya.

3. Mitra (*Partner*)

Peran NGO sebagai mitra merujuk pada kemampuan NGO untuk menjalin kerja sama dengan berbagai aktor dalam menjalankan program-program tertentu.⁴² NGO dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah tertentu di mana kebijakan atau program pemerintah mungkin tidak berjalan dengan baik. Peran mitra mencerminkan fakta bahwa NGO jarang beroperasi sendiri. Adanya kerja sama ini

⁴¹ David Lewis dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. 108-110.

⁴² David Lewis dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. 113.

diperlukan untuk memperkuat jaringan sosial yang diperlukan guna menghadapi berbagai tantangan di tingkat lokal maupun global.

Adanya kerja sama dengan berbagai aktor membuat NGO sering terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program bersama dengan aktor lain, seperti program pendidikan atau kesehatan di mana NGO membawa keahlian lokal dan pengetahuan kontekstual, sementara aktor lain mungkin menyediakan sumber daya finansial. NGO juga berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dari berbagai aktor yang bekerja sama melalui pelatihan dan transfer pengetahuan.⁴³ Misalnya, NGO dapat memberikan pelatihan kepada pemerintah lokal tentang praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program yang dijalankan secara bersama.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai masalah politik dengan pendekatan yang lebih mendalam. Biasanya, pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan naratif, yang membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan politik dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena memiliki format yang cenderung lebih terstruktur dengan memberikan gambaran umum dan objektif mengenai suatu fenomena yang mana biasanya bersumber dari dokumen

⁴³ David Lewis dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. 113-115.

resmi.⁴⁴ Adapun peneliti turut menggunakan berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan laporan tahunan yang berkaitan dengan peran CARE Internasional dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India pasca COVID-19 pada tahun 2021-2023.

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti akan memberikan batasan waktu penelitian yang akan diteliti yakni dari tahun 2021 hingga tahun 2023 guna mendeskripsikan penelitian ini dengan rentang waktu yang lebih spesifik. Adapun batas awal penelitian pada tahun 2021 ditujukan oleh penulis karena terdapat indikasi kenaikan kasus KBG terhadap perempuan di India secara drastis setelah adanya pandemi COVID-19 dan dimulainya kembali program-program CARE Internasional dalam menanggulangi KBG terhadap perempuan di India.⁴⁵ Sedangkan tahun 2023 ditujukan oleh peneliti sebagai batas untuk mendeskripsikan program-program CARE Internasional dalam menanggulangi KBG terhadap perempuan di India karena didorong oleh ketersediaan sumber informasi yang terbatas, seperti media sosial dan situs resmi terkait berbagai program CARE Internasional di India, yang hanya mencakup periode hingga tahun 2023.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang perlakunya hendak kita deskripsikan dan jelaskan di dalam suatu penelitian. Unit analisis sendiri dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena. Berbeda dengan unit

⁴⁴ S. Aminah dan Roikan. "Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik." 41-42.

⁴⁵ National Crime Records Bureau (NCRB). *Laporan Tahunan Mengenai Kejahatan di India*. 2021. (<https://www.ncrb.gov.in/> diakses online pada Oktober 2024)

analisis, unit eksplanasi atau variabel independen merujuk pada unit dalam suatu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi perubahan pada variable lain, yaitu variabel dependen. Singkatnya, variabel independen dianggap sebagai penyebab atau pengaruh yang memengaruhi variabel dependen.⁴⁶ Lebih lanjut, level analisis dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk memastikan validitas hasil penelitian di mana level analisis merujuk pada tingkatan di mana data dikumpulkan dan dianalisis, yang bisa bersifat individu, kelompok, atau makro, seperti negara atau masyarakat.⁴⁷

Dalam penelitian ini, unit analisinya adalah peran CARE Internasional di India dengan penanggulangan KBG terhadap perempuan di India pasca COVID-19 pada tahun 2021-2023 sebagai unit eksplanasi atau variabel independen. Adapun level analisis dari penelitian ini adalah negara karena menyoroti interaksi antara negara dan aktor non-pemerintah seperti INGO dalam konteks global. Level analisis negara memberikan analisis yang lebih mendetail karena adanya pembahasan melalui diferensiasi secara signifikan terhadap aktor-aktor di dalam hubungan internasional. Negara dipandang sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, memungkinkan peneliti untuk menguji aktor-aktor nasional secara lebih detail.⁴⁸

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik yang melibatkan pengumpulan data dan informasi

⁴⁶ Rusdiyanta. Tulus Yuniasi. Anggun Puspitasari. "Teori Hubungan Internasional." Vol. 1. Jakarta. Juli 2020. 65-67.

⁴⁷ Pradipta Mukherjee. "Levels of Analysis of International Relations." 2023. 1-2.

⁴⁸ Pradipta Mukherjee. "Levels of Analysis of International Relations." 2023. 1-2.

dengan menganalisis dokumen-dokumen tertentu yang relevan dengan penelitian berupa dokumen tertulis, gambar, atau media lainnya. Tujuan dokumentasi adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber-sumber tertulis yang dapat memberikan bukti atau konteks tambahan bagi penelitian. Sumber data dalam dokumentasi bisa berupa dokumen primer, seperti arsip resmi dan laporan tahunan maupun sekunder, seperti artikel yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁹

Sumber data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang membahas mengenai CARE Internasional, CARE India, dan India beserta keterkaitannya dengan kekerasan berbasis gender. Adapun kata kunci yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: CARE Internasional, CARE India, kekerasan berbasis gender (KBG), kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan dalam konteks darurat, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pasca COVID-19, dan peran INGO dalam menanggulangi KBG terhadap perempuan. Kemudian, secara kontekstual dan spesifik, peneliti turut menggunakan KBG di India, kekerasan domestik di India selama COVID-19, dan patriarki serta ketidaksetaraan gender di India sebagai kata kunci.

Adapun peneliti menggunakan situs resmi dari CARE Internasional (<https://www.care-international.org>) dan CARE India (<https://www.careindia.org>) yang sudah mencakup berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, termasuk laporan tahunan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh CARE Internasional beserta aktor lainnya, seperti UN Women, WHO, dan UNDP dalam menjalankan perannya dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di India termasuk situs resmi berbagai lembaga nasional India, seperti National

⁴⁹ S. Aminah dan Roikan. "Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik." 57.

Commission for Women (NCW) India (<https://ncw.nic.in>), dan National Crime Records Bureau (NCRB) India (<https://ncrb.gov.in>) sebagai sumber data dalam penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, biasanya dimulai dengan mengumpulkan dan menyederhanakan data atau informasi yang relevan dari berbagai sumber dan kata kunci yang digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi data atau informasi tersebut, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Setelahnya, data atau informasi disaring dan disederhanakan menjadi poin-poin analitis lalu disajikan dalam bentuk narasi yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola dan hubungan antardata atau informasi yang ada. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan yang harus didukung oleh bukti kuat dari data atau informasi yang telah dianalisis dan dapat berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁰

Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran CARE Internasional dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India dengan menggunakan konsep peran NGO oleh David Lewis, Nazneen Kanji, dan Themudo Nuno S., peneliti akan mengumpulkan data dan informasi terkait peran CARE Internasional dengan turut menyertakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh CARE Internasional dari berbagai sumber data yang relevan guna melihat keterkaitan antara peranan CARE Internasional dengan konsep peran NGO yang digunakan.

⁵⁰ S. Aminah dan Roikan. "Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik." 74-76.

1.9 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab yang menjadi pendahuluan yang berisikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah penelitian yang akan memberikan gambaran tentang informasi terkait topik pembahasan dan pentingnya studi terhadap topik tersebut yang kemudian disertai dengan tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI INDIA

Bab ini menguraikan permasalahan yang timbul dengan memberikan gambaran tentang situasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India, termasuk analisis mengenai sejarah kekerasan berbasis gender dengan fokus pada perempuan sebagai kelompok yang menjadi korban.

3. BAB III PROFIL CARE INTERNASIONAL

Bab ini akan menjelaskan mengenai CARE Internasional dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India. Dalam bagian ini, dimulai dengan menjelaskan gambaran umum mengenai CARE Internasional dengan meliputi latar belakang atau sejarah organisasi, tujuan, dan cara kerjanya hingga bagaimana CARE Internasional masuk ke India dan menjalankan perannya dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

4. BAB IV PERAN CARE INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI INDIA PASCA COVID-19 PADA TAHUN 2021-2023

Bab ini akan mendeskripsikan peran dari CARE Internasional berdasarkan analisis dengan kerangka konseptual peran NGO oleh Lewis, Kanji, dan Themudo dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India dengan berbagai strategi atau programnya pada tahun 2021-2023 serta tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di India.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

